

**IDENTIFIKASI KELEMBAGAAN LOKAL DALAM RANGKA
IMPLEMENTASI DAERAH PERLINDUNGAN LAUT BERBASIS
MASYARAKAT (DPL-BM) DI KOMUNITAS DESA SEKUNYIT
KABUPATEN KAUR**

**(LOCAL INSTITUTIONS IDENTIFICATION IN ORDER TO
IMPLEMENT COMMUNITY BASED MARINE PROTECTION REGION
IN THE VILLAGE OF SEKUNYIT, REGENCY OF KAUR)**

Redy Badrudin dan Septri Widiono
Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
Fakultas Pertanian
Universitas Bengkulu
Email: redybd@yahoo.com; sep3w@yahoo.com

ABSTRACT

This research is aimed to identify the local institutions as a basic for DPL-BM implementation, located in Sekunyit village, Kaur Selatan sub-district, district of Kaur. Qualitatif data obtained from Focus Group Discussion (FGD) and Key persons who are resourceable dan knowlegeble in the term of local institutions. This research was done in February and December 2009. The results are (1) As a general the condition of Socio-Economics of Desa Sekunyit People doing the occupation Fishermen dan Farmers, especially rainfed paddy, (2) Local institusion which is existing Farmer Group, cooperatives, Fishermen group, PKK, and religius group (pengajian), dan (3) DPL-BM institution founded is the modification of local institution. DPL-BM consisfs of DPL institution for men, Nafkah ganda group for women. (4) Rural goverment back up the DPL-BM through publishing the village rule about DPL-BM.

Key words: local institution, DPL-BM, household livelihood

PENDAHULUAN

Desa-desanya pantai di Kabupaten Kaur berhubungan langsung dengan Samudera Hindia yang berada di bagian Barat Sumatera. Sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai nelayan tradisional yang mengandalkan peralatan yang masih minim seperti tombak dan jaring bahkan yang menggunakan bahan peledak. Penduduk di daerah ini juga memanfaatkan batu karang untuk membangun rumah dan jalan sehingga karang di sepanjang pinggir pantai telah mengalami kerusakan. Apabila sempadan pantai ini rusak, maka akan mengganggu ekosistem terumbu karang maupun padang lamun di bawahnya. Ancaman kerusakan ekosistem terumbu karang di Desa Sekunyit, Kabupaten Kaur, dikarenakan pemahaman masyarakat terhadap nilai tidak langsung (*undirect use value*) yang sangat besar dari ekosistem terumbu karang

masih minim. Masyarakat baru dapat melihat nilai langsung (*direct use value*) yang sebenarnya jauh lebih kecil. Hal ini menyebabkan masyarakat lebih memilih memanfaatkan ekosistem terumbu karang yang mengarah kepada kerusakan bagi ekosistem yang vital ini. Banyak ekosistem terumbu karang yang rusak parah akibat kegiatan penangkapan ikan karang yang menggunakan bahan peledak dan bahan kimia yang berbahaya.

Ada rencana pembentukan Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat (DPL-BM) dari DKP dan Mitra Bahari. DPL-BM merupakan cara yang efektif untuk perlindungan keanekaragaman hayati laut dan pengelolaan pemanfaatan sumber daya yang lestari sehingga suatu daerah pesisir dan laut yang dapat meliputi beberapa ekosistem di dalamnya ditetapkan untuk ditutup secara permanen sehingga tidak ada kegiatan perikanan dan pengambilan sumberdaya dalam bentuk apapun yang didasarkan pada pemahaman bersama akan pentingnya pemeliharaan DPL.

RTM (rumah tangga miskin) nelayan rata-rata memiliki pendidikan formal yang terbatas. Untuk itu perlu *disupport* dengan sistem pendidikan non-formal yang dapat membantu untuk menambah pengetahuan dan keterampilan *livelihood diversification* yang mampu menambah pendapatan nelayan yang ramah lingkungan disaat tidak melaut karena hambatan alam.

Kelembagaan nelayan di kabupaten/kota terfokus di bidang ekonomi, yaitu program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Misalnya kelembagaan nelayan di Kabupaten Kaur beranggotakan beberapa Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) lebih terfokus pada kegiatan ekonomi (Ambarini, 2008). Demikian juga kelembagaan nelayan di Kota Bengkulu juga didominasi di bidang ekonomi yaitu program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) (Mitra Bahari Sub Regional Center Provinsi Bengkulu, 2007). Kelembagaan nelayan lainnya adalah Pengelolaan Sumber Daya Alam Skala Kecil (PASDASK) dari kegiatan *Adaptive Research* untuk Alternatif Pendapatan dari *Marine Coastal Resource Management Project* (MCRMP) (Bappeda Provinsi Bengkulu, 2008).

Permasalahan utama dari kelembagaan ini adalah bahwa pendapatan masyarakat nelayan tidak mencukupi untuk jumlah angsuran yang telah disepakati karena pendapatan usaha digunakan untuk nafkah keluarga. Kecilnya hasil tangkapan dan ketidakpastian kondisi di laut menjadi penyebabnya. Untuk itu kelembagaan nelayan perlu dilengkapi dengan tambahan peran pelatihan/konsultasi atau klinik kreasi nafkah ganda sehingga dapat memperkecil resiko nelayan.

Untuk maksud itulah perlu dilakukan inventarisasi kelembagaan lokal agar DPL-BM di Desa Sekunyit dapat diimplementasikan dan menjadi bermanfaat bagi kemaslahatan bersama.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Melihat Gambaran umum keadaan sosial ekonomi Desa Sekunyit,
2. Melakukan Identifikasi kelembagaan lokal,
3. Melihat model modifikasi kelembagaan lokal DPL-BM, dan
4. Melakukan pemahaman terhadap peraturan lokal.

METODE PENELITIAN

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan cara kajian mendalam dan FGD di Desa Sekunyit, Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Pertimbangan dipilihnya Desa ini adalah merupakan salah satu Desa yang kawasan konservasi laut daerah (KKLD) di Sekunyit, Linau dan Merpas. Dengan demikian Desa Sekunyit direncanakan untuk dijadikan KKLD yang perlu dipahami dan didukung oleh berbagai pihak, terutama kelembagaan lokal.

Data dan informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Dalam menganalisis data digunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu membahas data secara deskriptif, sistematis, faktual dan akurat.

1. Tahap Penelitian

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling terkait satu sama lain. Tahap pertama kegiatan difokuskan pada upaya eksplorasi lembaga dan masyarakat miskin pesisir. Tim melakukan wawancara dan diskusi dengan kelompok sasaran, pengurus lembaga, manajer, karyawan dan masyarakat. Tahap kedua hasil eksplorasi awal digunakan untuk menyusun rancangan indikator survey opini posisi dan peran lembaga yang ada serta ekspektasi peran lembaga masyarakat. Tahap ketiga, survey opini kemungkinan terbentuknya forum desa.

2. Teknik Pengumpulan data

Data yang dikumpulkan dalam data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan rencana penelitian. Berkenaan dengan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pendekatan utama untuk mengungkap tanggapan posisi dan peran lembaga yang diharapkan masyarakat terhadap layanan lembaga dan keterlibatan RTM adalah eksplorasi yang lebih condong pada penggunaan metode kualitatif. Pada tahap pertama penelitian ini menggunakan teknik koleksi data sebagai berikut: *in depth interview*, *Focus Group Discussion* (FGD), dan Analisis kelembagaan.

2. Penentuan Wilayah dan Responden

Metode pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja yaitu di Desa Sekunyit kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur. Pemilihan lokasi ini karena Desa Sekunyit merupakan salah satu kawasan konservasi terumbu karang yang ditetapkan di Kabupaten tersebut, selain Linau dan Merpas, dengan *multistage*. Tahap pertama secara *purposive* di pilih Kab Kaur, karena relatif banyak kelembagaan baik bentukan internal maupun eksternal masyarakat pesisir.

3. Analisa Data dan Informasi

Pendekatan metode partisipatif untuk menemukenali, yaitu *Participatory Reasearch Appraisal/PRA* (Adimihardja dan Hikmat. 2003) digunakan untuk memahami kehidupan sosial dan kelompok. Tahapan kajian sosial dan

kelembagaan menggunakan teknik koleksi data sebagai berikut: *in depth interview*, *Focus Group Discussion (FGD)*, dan Analisis kelembagaan. Proses kegiatan yang dilakukan pada hakekatnya ditujukan untuk melakukan pendalaman penilaian suatu topik yang dinilai cukup relevan.

Strategi pemberdayaan harus bertumpu pada proses yang sifatnya partisipatif (terakomodasinya aspirasi, terbukanya pilihan-pilihan dan terlibatnya semua komponen masyarakat/stakeholders). Kondisi ini dapat ditunjukkan dengan indikator aktualisasi diri dan koaktualisasi eksistensi masyarakat. Aktualisasi merupakan ekspresi diri setiap komunitas dalam pengambilan keputusan, baik pada tahap dialog, penemuan, dan pengembangan untuk program selanjutnya. Aktualisasi juga merupakan internalisasi penilaian yang merupakan hasil ekspresi diri yang dihargai dan dijadikan pertimbangan keputusan kelompok. Koaktualisasi eksistensi merupakan perilaku yang menunjukkan adanya aktualisasi bersama dalam komunitas yang berimplikasi pada eksistensi komunitas dalam mengatasi masalah-masalah sosial di lingkungannya. Teknik analisa dalam penelitian kualitatif meliputi pengujian, pemilahan, kategorisasi, evaluasi, membandingkan, melakukan sintesa, dan merenungkan kembali data yang diperoleh untuk membangun inferensi-inferensi dan kemudian menarik kesimpulan. Metode analisis ini memberikan peluang untuk terus menerus melakukan pengujian konsep berdasarkan bukti-bukti dan data-data yang diperoleh secara berulang. Dengan demikian tujuan untuk mencapai pemahaman yang menyeluruh (*whole-insight*) dan tuntas (*exhausted*) dapat dicapai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Sosial Ekonomi

Desa Sekunyit terletak di bagian Barat Kabupaten Kaur yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, yaitu sekitar 110 km dari Kota Bengkulu. Desa ini terletak di jalur Jalan Lintas Barat Sumatera. Perairan pantai Sekunyit berada pada 103°17'18,60288" - 103°46'58,98288" LU dan (-4°55'40,75524") - (-4°33'30,694392") BT. Luas wilayah Kabupaten Kaur 2.363,08 Km² yang terbagi menjadi tujuh kecamatan sedangkan jumlah penduduk adalah 110.428 jiwa yang tersebar di 198 desa dan tiga kelurahan.

Di perairan pantai Sekunyit terdapat anak sungai yang bermuara dan tidak terlalu memberi pengaruh karena debit airnya yang kecil. Di daerah ini terjadi musim kemarau pada bulan Januari - Agustus dan musim penghujan pada bulan September - Desember. Terdapat dua pola arus yaitu arus pasang dan arus surut, dimana arus ini merupakan perambatan arus dari Samudera Hindia.

Secara tofografi perairan pantai sekunyit merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 - 4 meter dari permukaan laut. Di perairan pantai ini dapat dikatakan tidak ada sampah plastik, botol-botol, dan atau pecahan kaca. Dari

pengamatan lapangan di pantai Sekunyit terjadi abrasi yang diakibatkan oleh hempasan ombak akan tetapi terjadinya tidak secepat di daerah lain karena masih terhalang oleh terumbu karang.

Perairan pantai Sekunyit pada saat surut terendah memiliki daerah intertidal hingga mencapai 50 – 60 meter kearah laut dari batas pasang tertinggi. Substrat perairan terdiri dari pasir halus, pasir kasar, pecahan karang mati, dan karang hidup serta banyak terdapat berbagai jenis algae (rumpun laut). Disekitar pantai terdapat banyak pohon kelapa, jenis pandan, waru laut, dan vegetasi tumbuhan laut lainnya akan tetapi tidak terdapat ekosistem mangrove.

Berdasarkan Profil Desa (2009), Luas desa Sekunyit adalah 1.136 Ha dengan jumlah penduduk tercatat sebanyak 888 jiwa dengan sebagian besarnya termasuk dalam usia produktif. Penduduk desa Sekunyit 100 % memeluk agama islam. Profil desa juga menggambarkan urutan kategori mata pencaharian penduduk yaitu 75% dikategorikan bekerja pada subsektor pertanian/perikanan, 10% bekerja pada subsektor peternakan, 5% bekerja pada subsektor Perdagangan, 5% bekerja pada subsektor buruh harian dan 5% bekerja pada subsektor Jasa (termasuk guru, pegawai negeri, pensiunan).

Hasil survei menunjukkan bahwa sektor perikanan merupakan kegiatan penting Desa Sekunyit seperti desa-desa pesisir pada umumnya diikuti kegiatan pertanian. Penangkapan ikan memainkan peranan penting untuk kegiatan produktif di Desa Sekunyit seperti desa-desa pesisir lainnya. Di pantai terdapat TPI dan pendaratan perahu-perahu tempel milik nelayan dan orang-orang yang berjualan ikan, hal ini merupakan pemandangan umum yang dapat dilihat di desa ini. Sepanjang hari dapat dilihat perahu yang datang dan pergi di sekitar pantai desa. Alat penangkapan yang paling banyak dipakai adalah pancing yang digunakan baik dengan menggunakan perahu atau hanya berdiri di tepi pantai/terumbu karang. Jenis ikan yang paling banyak tertangkap yaitu ikan tongkol, tenggiri, serai, hiu, belida, cucut, rucan dan banyak jenis ikan karang seperti kerapu, dll. Jenis tanaman yang paling banyak ditanam oleh masyarakat adalah tanaman padi, sawit, cengkeh, dan kacang-kacangan.

Selain penduduk asli di Desa Sekunyit juga banyak penduduk pendatang, yang umumnya berasal dari kecamatan atau kabupaten sekitar. Orang-orang tersebut memilih datang ke Desa Sekunyit karena di desa tersebut masih bisa menangkap ikan di laut atau membuka lahan pertanian.

Adapun beberapa alasan positif pembentukan DPL-BM di kelurahan Sekunyit adalah, sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya aktivitas pembangunan di wilayah pesisir yang berdampak pada peningkatan aktivitas pemanfaatan sumberdaya pesisir, timbulnya pencemaran lingkungan dan degradasi lingkungan pesisir;
- 2) Nelayan Sekunyit mengalami kesulitan dalam memperoleh tangkapan, karena sumberdaya ikan telah menurun;
- 3) Karena kelurahan Sekunyit berhadapan langsung dengan laut lepas yang memiliki aktivitas arus dan gelombang yang besar. Kerentanan pantai Sekunyit dari pengaruh gelombang laut lepas, mengharuskan kita untuk mengelolanya dengan tepat dan bersifat konservatif.

Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat (DPL-BM) bertujuan untuk: (1) memelihara fungsi ekologis dengan melindungi habitat sebagai tempat hidup, mencari makan, membesarkan anak, bertelur & memijah biota-biota laut; (2) memelihara fungsi ekonomis kawasan pesisir bagi masyarakat, sehingga terjadi keberlanjutan dan produksi perikanan yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan, baik dari hasil produksi perikanan maupun dari sektor pariwisata bahari.

Membentuk Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat (DPL-BM) bukanlah hal yang sederhana, akan tetapi relative rumit karena harus dilakukan melalui pendekatan yang sistematis. Wilayah yang akan dijadikan sebagai DPL-BM harus memiliki beberapa karakteristik yang sesuai untuk peruntukannya. Berikut adalah karakteristik sebagai dasar pemilihan wilayah pesisir tertentu ditetapkan sebagai DPL-BM:

- 1) Wilayah tersebut rentan terhadap proses degradasi, wilayah pesisir dihuni oleh masyarakat, khususnya masyarakat nelayan;
- 2) Keterwakilan wilayah ekosistem terumbu karang yang ada di lokasi tersebut;
- 3) Tingkat ketergantungan masyarakat nelayan terhadap sumberdaya pesisir dan laut cukup tinggi;
- 4) Keinginan masyarakat terhadap pengelolaan pesisir cukup tinggi, dan didukung pihak pemerintah setempat.

Kriteria penentuan lokasi DPL-BM dapat didasarkan pada beberapa faktor, antara lain: (1) kondisi ekosistem terumbu karang masih cukup baik; (2) keanekaragaman hayati relatif tinggi; (3) tidak ada konflik penggunaan sumberdaya pesisir, misalnya daerah utama penangkapan ikan dan jalur transportasi laut; (4) jauh dari potensi pencemaran lingkungan; (5) mobilitas dan pergerakan masyarakat ke lokasi cukup dekat; dan (6) keinginan dan pengetahuan masyarakat terhadap kelestarian lingkungan cukup tinggi.

Dari hasil survei di masyarakat Desa Sekunyit sangat partisipatif ketika diberikan sosialisasi tentang DPL dan mereka menerima dengan senang apabila di Desa Sekunyit ditetapkan DPL, dalam pelaksanaannya memang membutuhkan partisipasi sepenuhnya dari masyarakat Desa Sekunyit. Misalnya, dengan proses partisipasi, masyarakat akan lebih merasakan manfaat dari program yang dilaksanakan. Selain itu, masyarakat juga akan membantu dalam implementasi program dan terlibat aktif dalam pemeliharaan selama dan sesudah program dilaksanakan. DPL berbasis masyarakat yang dimaksudkan adalah *co-management* (pengelolaan kolaboratif), yaitu pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah setempat. Pengelolaan berbasis masyarakat bertujuan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan suatu pengelolaan DPL.

Pengelolaan DPL berbasis masyarakat berawal dari pemahaman bahwa masyarakat mempunyai kemampuan sendiri untuk memperbiki kualitas kehidupannya, sehingga dukungan yang diperlukan adalah menyadarkan masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya alam untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya. Namun demikian, pada kenyataannya pengelolaan yang murni berbasis masyarakat kurang berhasil, oleh karena itu dukungan dan persetujuan dari pemerintah dalam hal memberikan pengarahan, bantuan teknis dan bantuan aspek hukum suatu kawasan konservasi sangat diperlukan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dan pemerintah secara bersama-sama sejak awal kegiatan dari mulai perencanaan, pengelolaan sampai evaluasi suatu DPL sangatlah penting. Selain dukungan dari pemerintah, maka dukungan dan kerja sama dengan lembaga pendidikan, penelitian serta LSM juga dibutuhkan guna menentukan lokasi DPL dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar DPL.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh karena proses partisipatif dalam merencanakan dan mengelola DPL adalah:

- Pelibatan masyarakat dapat membantu bahkan bertanggung jawab dalam penegakan aturan, sehingga biaya penegakkan hukum dan pengawasan kawasan menjadi kecil.
- Masyarakat merasa memiliki DPL, dan dapat membuat aturan sendiri untuk ditetapkan di lingkungannya
- Masyarakat akan membuat program penggalangan dana untuk operasional DPL melalui kegiatan ekonomi, seperti pariwisata dan tarif masuk, dll.
- Menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk bekerjasama dalam bentuk organisasi di tingkat desa.

Mempertahankan keragaman hayati di Perairan Pantai Desa Sekunyit Kabupaten Kaur dan keberlanjutan perikanan setempat dalam jangka panjang.

Identifikasi Kelembagaan lokal

Setiap masyarakat, termasuk nelayan memiliki kelembagaan sosial yang merupakan suatu organ yang berfungsi dalam masyarakat, Abdulsyani (2002). Kelembagaan tersebut merupakan himpunan dari norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada satu kebutuhan pokok dalam masyarakat yang salah satu wujud konkritnya association.

Tergantung kepada kebutuhan pokok, kelembagaan sosial mawadahi kebutuhan pokok sosial/pendidikan/pencerahan. Kelembagaan Ekonomi adalah lembaga yang diperuntukan untuk pengaturan kegiatan keperluan ekonomi. Fungsi lembaga sosial adalah memberikan pedoman, menjaga keutuhan dan pengendalian sosial. Sistem pengawasan dari masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya. Dalam rangka pembentukannya sebagai lembaga sosial, lembaga memiliki norma-norma yang mengalami beberapa proses, yaitu institutionalization proses norma menjadi bagian lembaga sosial sehingga norma tersebut menjadi diakui, dihargai, dan selanjutnya ditaati dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian semakin *internalized* / mendarah daging dalam jiwa anggota masyarakat (Soekanto. 1982).

Selanjutnya kelembagaan sosial tidak terlepas dari dinamika kelompok sosial. Ruth Benedict dalam Santosa (2006), mengatakan bahwa dinamika kelompok ditentukan oleh beberapa persoalan diantaranya, yaitu:

Kohesi/persatuan, Motif/dorongan, struktur, pimpinan, perkembangan kelompok. Kohesi merupakan tingkah laku anggota kelompok berkenaan dengan persatuan. Motif merupakan interest anggota terhadap kelompok. Struktur merupakan bentuk pengelompokan, perbedaan kedudukan, dan pembagian tugas. Kepemimpinan meliputi tugas dan sistem kepemimpinan. Perkembangan kelompok meliputi senangnya anggota dalam kelompok dan perpecahan dalam kelompok.

Terdapat kecenderungan faktor kepemimpinan menjadi faktor determinan di dalam organisasi dalam mencapai tujuannya sebagaimana dikatakan oleh Amidudin (1995) Figur kepemimpinan pada tatanan masyarakat Indonesia masih dianggap strategis. Terdapat beberapa indikasi bahwa faktor kepemimpinan, doktrin dan program organisasi mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan kelembagaan. Kondisi demikian tentunya sangat ditentukan oleh tujuan maupun struktur organisasi. Di dalam organisasi yang lebih mementingkan kebersamaan di dalam mencapai tujuannya maka gaya kepemimpinan yang demokratis akan lebih sesuai dalam mencapai tujuan organisasi.

Dalam hal kaitannya dengan kepemimpinan, kelembagaan perlu dikondisikan agar menjadi pemimpin itu memungkinkan untuk membagi pownya secara kolektif, efektif dan efisien seperti Teory Y (Mac. Gregor dalam Robin, 2003). Disamping itu juga setiap elemen dari kelembagaan, termasuk anggota, merasakan aroma kundusif untuk melakukan aktivitas budaya, sosial dan ekonomi. Teori Y lebih cocok untuk pembedayaan karena akan menghasilkan lembaga yang anggotanya kreatif dan suka bekerja. Liliweri (1977) mengatakan bahwa dengan teori Y, manusia akan mengaktualisasi diri, meningkatkan motivasi, kreatif, dan terbuka.

Pada kesempatan pelaksanaan *Preliminary Survey* ke daerah nelayan Desa Sekunyit Kec.Kaur Selatan, Kabupaten Kaur. Kegiatan ini lebih banyak melaksanakan survey potensi kelembagaan. Kelembagaan yang potensial dijadikan partner dalam kegiatan ini terdapat 16 lembaga, yang terdiri dari Koperasi, Gapoktan, Kelompok Tani - Nelayan, Instansi, Perangkat Desa dan Pemuka Agama.

Dari 16 kelompok yang ada dipetakan kedalam 5 buah kelompok utama yang dapat berperan dalam kegiatan DPL-BM. Untuk komunitas Nelayan petani masyarakat memiliki kelompok binaan Departemen Pettanian, yaitu berupa Gapoktan yang diketuai Bapak Adnan. Bapak Adnan seorang guru SD (sekolah Dasar) yang sangat dipercayai oleh komunitasnya. Ketika mereka ingin membentuk Gapoktan tetap masyarakat mempercayai kepemimpinan kepada Bapak Adnan untuk urusan pertanian. Meskipun nelayan mereka bertani padi. Para Nelayan di daerah Pesisir di Provinsi Bengkulu tidak tenang ke laut apabila dirumah tidak ada padi (beras). Sehingga bila musim turun sawah, para nelayan akan meninggalkan kegiatannelayannya untuk mendapat harapan nmasa depan pada penghasilan padi. Kelaut itu kapan saja bisa, asal tidak musim badai kata beberapa nelayan.

Kelompok kedua adalah Kelompok Elyan dan Baroni. Komunitas ini adalah komunitas perkebunan, pertanian dalam arti agribisnis, sehingga mereka membentuk koperasi Agri-Mina (pertanian dalam arti luas dan Perikanan laut).

Kelompok ke-tiga, ke-empat dan ke-lima adalah komunitas nelayan yang mempunyai kaitannya dengan juragan (Toke). Hubungan sosial antara Tokek dan Nelayan adalah hubungan Bapak dengan anak-buah. Hampir semua tunduk apa perkataan "Toke" .

Permasalahan yang ada bagaimana caranya dari berbagai polarisasi ini mampu dipersatukan, meskipun secara perlahan, dalam satu visi dan misi bahwa mereka sedapat mungkin mampu mempertahankan kepentingan bersama yaitu DPL-BM

Untuk mencapai tujuan tersebut dibuatlah "pengurus sementara" yaitu :

Ketua	: Bapak Suardi
Sekretaris	: Bapak Adman Dewanta
Bendahara	: Bapak Novi

Sekitar satu bulan kemudian dibuatlah Forum DPL-BM dan Nafkah Ganda (NG) yang kepengurusannya melibatkan 5 kekuatan kelompok . Setiap kelompok harus mengitrimkan 3 orang kader (2 laki-laki dan 1 perempuan) untuk menjadi Kader Dpl-BM dan NG. Total kader ini sebanyak 15 orang yang siap memberikan pencerahan khususnya pada kelompoknya dan umumnya pada masyarakat luas.

Model Modifikasi Kelembagaan Lokal DPL-BM

Penguatan Kelembagaan dilakukan dengan pemetaan kelompok yang dilakukan di Sekunyit, 19 September 2009. hasilnya terdapat lima kelompok potensial yang dapat bersama-sama melaksanakan pemeliharaan DPL dan mensukseskan aktivitas NG. kelima kelompok tersebut adalah Kelompok Pak Kades dan Pak Suardi, Kelompok Pak Udin S. dan Pak Ali, Kelompok Pak Masud dan Pak Novi/ Koperasi Bina Bahari, Kelompok Pak Elyan dan Pak Baroni/ Koperasi Agri Mitra Mina. Dan Kelompok Pak Adman/Gapoktan - Nelayan (lampiran 3 dan 4).

1. Forum Kader DPL dan NG

Pengkaderan dilaksanakan untuk 15 orang yang merupakan perwakilan dari masing-masing kelompok. Setiap kelompok diwakili 3 orang yang terdiri dari dua orang bapak-bapak dan satu orang ibu. Sehingga jumlah kader ada 15 orang di Desa Sekunyit. Ke-15 kader ini siap menerima pesan dan menyampaikan pesan kepada kelompoknya apabila diperlukan baik itu sebagai kader DPL ataupun sebagai kader Nafkah Ganda (NG).

Aktivitas NG difokuskan pada Ibu-ibu untuk keterampilan bisnis yang kontinyu sehingga membantu bapak-bapak nelayan ketika masa paceklik ikan, seperti saat sedang ada badai sehingga nelayan tidak bisa ke laut atau hanya bisa mengambil ikan dengan cara lain selain menggunakan perahu dan kapal.

Para kader dilengkapi dengan berbagai media untuk memudahkan mereka menjadi nara sumber lokal. Baik sebagai nasasumber lokal untuk DPL atau NG, seperti: Media, brodur, CD dan booklet, dan lain-lainnya.

2. Deseminasi pada Masing-masing Kelompok

Masing-masing kader siap membantu menyampaikan pesan kepada kelompoknya atau kepada pihak lain. Masing-masing kelompok telah memiliki sistem kearsipan yang disimpan dalam lemari kelompok. Pesan pembagangnan tentang DPL dan Nafkah Ganda (NG) dapat disampaikan kepada Forum/Kelompok DPL dan NG atau langsung kepada masing-masing kelompok.

3. Pemahaman Peraturan Lokal

Agar pengelolaan Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna (efisien dan efektif) maka keberadaan DPL perlu ditunjang dengan sebuah aturan hukum yang memiliki kekuatan hukum kuat di tingkat desa. Idealnya DPL hendaknya didukung dengan sebuah Peraturan Desa (Perdes), atau minimal Keputusan Desa (Kepdes). Keberadaan Perdes atau Kepdes mutlak diperlukan untuk mendukung keberhasilan pengelolaan suatu kawasan DPL. Keberhasilan pengelolaan suatu kawasan DPL sangat tergantung pada aturan-aturan yang dibuat dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan masyarakat. Perdes atau Kepdes tentang DPL merupakan sebuah peraturan perundang-undangan formal yang memiliki kekuatan hukum terkuat di tingkat desa. Perdes ini harus mengikat masyarakat di dalam dan luar desa, sehingga masyarakat, Pemerintah Desa, dan Pokmas Konservasi yang mengelola DPL mempunyai kekuatan atau dasar hukum untuk melarang atau menindak pelaku pelanggaran.

Untuk memayungi Peraturan Desa atau Keputusan Desa tentang Daerah Perlindungan Laut idealnya dibuat Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu di tingkat kabupaten/kota dan di tingkat provinsi. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu di tingkat Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu di tingkat kabupaten/kota dan di tingkat provinsi dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan yang bersifat lintas desa dan atau lintas kabupaten/kota. Apabila terjadi permasalahan lintas desa dan atau lintas kabupaten/kota maka sudah ada perangkat hukumnya untuk mengatasinya.

4. Permasalahan dan Tantangan

Pengenalan Daerah Perlindungan Laut (DPL) sebagai zona bebas dari penangkapan secara langsung akan memunculkan dampak terutama bagi para nelayan di Desa Sekunyit. Para nelayan tidak akan lagi melakukan kegiatan penangkapan pada area yang sudah ditetapkan menjadi DPL dan diberi tanda pelampung. Disamping itu, penetapan DPL di Sekunyit memerlukan proses penjagaan dan pemeliharaan terhadap peralatan pelampung agar DPL dapat

diimplementasikan melalui kesadaran dalam diri masyarakat. Dua hal penting tersebut berhasil diungkap dalam Diskusi Kelompok Terarah (*Focus Group Discussion*/FGD).

Permasalahan pertama yang terungkap dalam diskusi adalah implikasi implementasi DPL di Desa Sekunyit. Beberapa permasalahan yang muncul adalah:

- Pemilihan tempat yang akan dijadikan sebagai DPL dimana 20 persen dari wilayah operasi nelayan mesti dibebaskan.
- Pelaksanaan DPL mesti dijalankan secara bertahap hingga mencapai 20 persen wilayah sebagaimana diatur melalui peraturan perundang-undangan.
- DPL mesti dilembagakan sebagai suatu norma yang diakui dan dihormati oleh para nelayan baik dari dalam Sekunyit maupun luar Sekunyit. Untuk itu diperlukan sosialisasi antar sesama warga desa tentang pentingnya DPL di Sekunyit.
- Diperlukan organisasi di tingkat desa untuk mengimplementasikan kelembagaan DPL tersebut.
- Untuk menegaskan kedudukan DPL di Sekunyit diperlukan regulasi dalam bentuk Perdes yang mengatur penetapan DPL dan sanksi-sanksi bagi pelanggarnya. Agar pelaksanaan sanksi berlangsung efektif diperlukan juga regulasi pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu Perda DPL.

Disamping itu, peserta FGD yang terdiri dari para nelayan dan ibu rumah tangga mulai menyadari bahwa implementasi DPL di Sekunyit akan memberikan dampak pada kegiatan penangkapan ikan. Mereka tidak dapat lagi menangkap ikan terutama pada area di sekitar muara Sekunyit baik area dengan kondisi terumbu karang yang sudah rusak maupun yang masih baik. Sebagai konsekuensinya, rumah tangga nelayan memerlukan penghasilan sampingan yang dapat diandalkan, terutama pada saat musim sepi ikan. Pekerjaan sampingan itu nantinya lebih diprioritaskan bagi kaum perempuan agar memiliki kegiatan produktif. Dalam diskusi kelompok tersebut berhasil diungkapkan bahwa pekerjaan sampingan yang dipandang sesuai untuk ibu-ibu adalah usaha pengolahan hasil tangkapan, seperti pengolahan rumput laut dan ikan.

Permasalahan menjadi muncul pada saat ada aspirasi untuk mengadakan usaha pengolahan hasil tangkapan dari para peserta diskusi. Selama ini mereka tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk menjalani usaha tersebut. Para ibu lebih sering menjalani kegiatan domestik dalam pengurusan rumah tangga. Jadi keinginan untuk mengembangkan usaha pengolahan rumput laut dan ikan kering merupakan suatu hal baru bagi mereka. Akhirnya mereka menyepakati akan mengadakan pelatihan pengolahan hasil tangkapan menjadi produk-produk jadi yang siap untuk dipasarkan. Jika usaha pengolahan hasil tangkapan tersebut dapat dikelola dengan baik harapannya akan dapat menambah pemasukan rumah tangga nelayan.

Kedua permasalahan yaitu implikasi implementasi DPL dan dampak bagi nafkah rumah tangga tersebut perlu dipisahkan bersama-sama dengan

menekankan pada partisipasi dan inisiatif warga setempat. Akan tetapi, tim peneliti memandang penting untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ke dalam satu program kegiatan yang menekankan keterlibatan warga baik dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaannya. Untuk itu warga perlu mengorganisasikan dirinya ke dalam satu wadah perkumpulan. Perkumpulan itu nantinya akan berfungsi menjalankan program-program seperti:

- Pengawasan implementasi DPL
- Pemeliharaan pelampung
- Penyelenggaraan pelatihan-pelatihan peningkatan nafkah
- Penyelenggaraan ruang baca
- Penyelenggaraan pengemasan dan pengepakan produk olahan

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Gambaran umum sosial ekonomi masyarakat Desa Sekunyit kebanyakan sebagai Nelayan juga Petani sawah tadah hujan
2. Kelembagaan lokal sebelum adanya DPL-BM. teridentifikasi berupa KelompokTani, Koperasi, kelompok Nelayan, Kelompok PKK, dan Pengajian
3. Kelembagaan DPL-BM merupakan modifikasi kelembagaan lokal yang terdiri dari DPL-BM baik berupa forum desa atau dalam bentuk kelompok.
dan nafkah ganda Nafkah Ganda.
4. Perdes Kelembagaan Nelayan yang ada sifatnya baru tentative (Sementara)

Saran

1. Perlu dibuat payung peraturan desa tentang DPL idealnya dibuat Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu di tingkat kabupaten/kota dan di tingkat provinsi. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu di tingkat Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu di tingkat kabupaten/kota dan di tingkat provinsi dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan yang bersifat lintas desa dan atau lintas kabupaten/kota.
2. Masyarakat mengusulkan kelembagaan lebih diberdayakan lagi dengan membentuk kelembagaan Daerah Penangkapan Ikan Buatan (DPI-buatan) diluar daerah DPL. Sehingga semua unsur masarakat terwadahi (Ibu-ibu terwadahi dalam Nafkah Ganda, Bapak-Bapak Nelayan menjaga DPI dan mencari Ikan pada DPI-buatan, sehingga pola penangkapan ikan tidak lagi bersifat destruktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2002. *Sosiologi Skematika, Teori. dan Penerapan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Aminudin, Ahmad. 1995. *Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Kelembagaan Program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) di Kabupaten Klaten*. Jurnal Penelitian Lembaga Penelitian Universitas Bengkulu. Tahun 1 No3, Juli 1995.
- Bappeda Provinsi Bengkulu. 2003. *Pekerjaan Identifikasi Aktivitas bagi Peningkatan Pendapatan Masyarakat Pesisir dan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Kelautan Di Lokasi MCMA*. Pratama jaya consultant. Bengkulu.
- Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Bengkulu dan Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. *Tiga Paket PNPM-Mandiri*. RB, Kamis 10 juli 2008
- Departemen Kelautan dan Perikanan. 2006. *Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Pesisir dan Laut*. Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- Eaton. 1992. *Institution Building and Development From Concept to Application*. Sage Publication Beverly Hills. London.
- Goode, J Wiliam. 2007. *Sosiologi Keluarga*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Liliweri, Alo. 1977. *Sosiologi Organisasi*. PT. Citra Aditya Bahakti. Bandung.
- Mubyarto. 2002. *Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah Dalam Era Otonomi Daerah*. Jurnal Ekonomi Rakyat Artikel - Th. I - No. 9 - November. 2002. Copyright©2002. www.ekonomirakyat.org.
- Nikijuluw, Victor P.H. 2001. *Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat pesisir serta Strategi Pemberdayaan Mereka Dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Secara Terpadu*. Makalah pada Pelatihan Pengelolaan Pesisir Terpadu. Proyek Pesisir, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor (IPB). Hotel Permata, Bogor, 29 Oktober 2001.
- SK Bupati No. 80 Tahun 2007 Kabupaten kaur. Penetapan kawasan Linau, Merpas, dan Sekunyit sebagai kawasan konservasi laut daerah (KKLD) di Kabupaten Kaur
- Tim Pengendali PNPM Mandiri. 2009. *Tujuan PNPM Mandiri*.